

BAB VI PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Selatan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis varians pendapatan 2013 – 2015 terdapat selisih kurang anggaran atau selisih yang tidak diharapkan, yakni pada tahun 2013 sebesar 98,79% pada tahun 2014 sebesar 99,76% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 98,37%.
2. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa analisis rasio derajat desentralisasi mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 4,33% pada tahun 2014 sebesar 6,72% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 7,07%.
3. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat/propinsi, yakni pada tahun 2013 sebesar 95,67% pada tahun 2014 sebesar 93,17% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 92,93%.
4. Berdasarkan rasio efektifitas PAD dapat diketahui rasio efektifitas PAD pada tahun 2013 sebesar 85,70% pada tahun 2014 sebesar 127,75% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 117,03% dapat diketahui bahwa dari tahun 2013–2015 rasio efektifitas PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat efektif.

5. Berdasarkan analisis varians belanja terdapat penghematan anggaran belanja, yakni pada tahun 2013 sebesar 83,80% pada tahun 2014 sebesar 77,13% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 79,97%.
6. Berdasarkan analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa adanya efisiensi belanja daerah selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2013 sebesar 83,80% pada tahun 2014 sebesar 77,13% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 100,40%.

1.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja pendapatan dan belanja daerah, yakni antara lain:

1. Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD. Ada juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan untuk meningkatkan PAD.

2. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2013-2015. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Baridwan, zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE
- Daries, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Penerbit Indeks
- Halim Abdul, Muhamad SyamKusufi.2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta Salemba Empat
- Kornelius kelemur kroon, M.E. Perseveranda.2016,*Analisis Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pemekaran dan Kabupaten Induk di Provinsi NTT*. Kupang : Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume 6, nomor 1,
- Mahmudi.2009,*Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : Erlangga
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mustari Wilhelmus, Maria Odriana Veronika Moi, Alfanita Martha.2014, *Analisis Defisit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008 – 2011*. Kupang : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Volume 3, nomor 2,
- Nafarin M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 13 tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 58 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Veronika Rika Seran, Rere Paulina Bibiana, Dan M.E. Perseveranda.2016,
*Analisis Kinerja Pendapatan Asli Dearah Kota Kupang Tahun Anggaran
2011-2013*. Kupang : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Volume 5,
nomor 2,

www.kabkutim.go.id/iddiakses tanggal 23/10/2012